

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru pembangunan yang ditetapkan melalui Otonomi daerah, secara langsung belum menyentuh masyarakat pada level bawah. Kegagalan pembangunan melalui pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan (*Growth with equity approach*), adalah karena *trickle down effect* yang salah sasaran. Untuk itu maka pendekatan pembangunan yang mengarah kepada pendampingan dan kajian realitas respon masyarakat terhadap pembangunan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Hal ini berarti bahwa konsep pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan harus diarahkan pada terwujudnya pusat-pusat pelayanan secara adil dan merata, yang di implementasikan dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang mengacu pada UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan ruang, dimana pada pasal 3 disebutkan bahwa :

- 1) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumberdaya manusia.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- 4) Mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan.

Dalam konteks ini, peruntukan suatu wilayah/dacrah biasanya ditentukan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sehingga diperlukan suatu Perencanaan Tata Guna Lahan (*Land Use Planning*) yang merupakan suatu proses perencanaan terhadap penggunaan/pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi.

Adapun tujuan dari Perencanaan Tata Guna lahan ini antara lain adalah untuk menentukan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang tepat, sesuai dengan kondisi lahan yang ada, sehingga sesuai dengan peruntukannya.

Komposisi pemanfaatan dan perencanaan penggunaan tanah/lahan dari suatu wilayah ditentukan oleh luas, topografi (kondisi, bentuk dan struktur), jenis tanah, populasi (pertumbuhan penduduk), kelompok etnis, sarana dan prasarana transportasi (infrastruktur), dan sebagainya. Sedang tata guna lahan yang diterapkan didaerah perkotaan biasanya lebih difokuskan pada lahan-lahan untuk pemukiman, perdagangan, perkantoran dan penghijauan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yang juga merupakan Ibukota Provinsi Riau, secara geografis terletak di antara $101^{\circ} 14'' - 101^{\circ} 34''$ Bujur Timur dan antara $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45''$ Lintang Utara, pada ketinggian antara 5 – 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km², meliputi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 779.899 jiwa, meningkat menjadi 799.213 jiwa pada tahun 2008.

Secara rinci persebaran penduduk antar kecamatan di Kota pekanbaru pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan, tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km2 (Jiwa)
01	Tampan	59,81	101.661	1.700
02	Payung Sekaki	43,24	73.205	1.693
03	Bukit Raya	22,05	85.697	3.856
04	Marpoyan Damai	29,74	126.316	4.247
05	Tenayan Raya	171,27	99.879	583
06	Lima Puluh	4,04	44.564	11.031
07	Sail	3,26	23.379	7.171
08	Pekanbaru Kota	2,26	31.355	13.874
09	Sukajadi	3,76	55.986	14.890
10	Senapelan	6,65	39.436	5.930
11	Rumbai	128,85	51.258	398
12	Rumbai Pesisir	157,33	66.477	423
	Jumlah	632,26	799.213	1.264

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pekanbaru Dalam Angka 2009

Di lihat dari tingkat kepadatan penduduk per km², terpadat adalah kecamatan Sukajadi yakni 14.890 jiwa per km², kemudian Kecamatan Pekanbaru Kota 13.874 jiwa per km² serta Kecamatan Lima Puluh, yakni sebanyak 11.031 jiwa per km².

Sedang Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, masing-masing sebanyak 398 jiwa dan 423 jiwa per km². Dari 12 kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru tersebut, ada beberapa kecamatan yang wilayahnya terletak di daerah pinggiran aliran sungai (DAS) Siak, yaitu : Kecamatan Senapelan meliputi 6 kelurahan,, Kecamatan Rumbai 5 kelurahan, Kecamatan Rumbai Pesisir 6 kelurahan dan Kecamatan Lima puluh 4 kelurahan.

Salah satu kawasan yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui penataan kota adalah kawasan pinggiran sungai Siak yang berada di wilayah kecamatan Senapelan, dengan membangun "*water front city*", dan sekaligus akan dijadikan sebagai Pusat ekonomi masyarakat, Daerah Pariwisata dan Pusat Budaya Melayu oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penetapan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain adalah bahwa di Kecamatan Senapelan ini terdapat berbagai keunikan seperti : Masjid Raya (Mesjid tertua), beserta Makam pendiri Kota Pekanbaru, sebagai Pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sebagai Pelabuhan sungai, sebagai urat nadi transportasi air bagi masyarakat Kota Pekanbaru terutama yang tinggal di pinggiran sungai, lalu lintas perdagangan antar pulau, dan daerah tujuan wisata Belanja di Pasar Bawah (Bappeda Kota Pekanbaru, 2001; 1-7).

Pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tidak merata dan berbagai permasalahan lain yang menyertainya, telah mempengaruhi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dipinggiran sungai Siak, sehingga permasalahan yang dihadapi adalah mengupayakan bagaimana agar kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak menimbulkan konflik kepentingan baik diantara masyarakat itu sendiri maupun antara pemerintah.dengan masyarakat.

Schubungan dengan itu maka persoalan pembangunan (dacrah) dewasa ini cenderung mengarah kepada beberapa persoalan, yakni :

- a. Respon masyarakat lokal terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan
- b. Independensi masyarakat dalam membentuk diri sebagai masyarakat yang *self-determination* dan *self regulating*. Dalam konteks tersebut maka *community-based develompent* sangat relevan.
- c. Penguatan peran masyarakat sebagai subjek (pelaku) dan objek pembangunan.

Kondisi faktual dalam pembangunan dewasa ini adalah, adanya dikotomi yang semakin kentara dari elemen pelaku pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah masih merasa sebagai “penguasa” daripada sebagai partisipan dalam proses pembangunan dan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masalah kualitas SDM daerah yang masih rendah dan belum memadai untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya, meskipun sudah lama diwacanakan, tetapi sampai saat ini persoalaannya belum juga kunjung usai.

Sebagai sumber berbagai macam aktivitas dan kepentingan masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai, maka pada saat ini kawasan disepanjang Daerah Aliran Sungai Siak (terutama yang berada diwilayah Kota Pekanbaru) sudah merupakan dacrah yang padat penduduknya. Sehingga sungai Siak yang semula berfungsi sebagai tempat mencari ikan, tempat mencuci dan mandi bahkan sumber air minum bagi masyarakat disekitar bantaran sungai, ternyata sekarang sudah tidak layak lagi,

karena airnya sangat kotor dan tercemar oleh berbagai limbah cair maupun padat, yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri atau pabrik yang banyak terdapat di sepanjang pinggiran aliran sungai Siak tersebut. Disamping itu, bila turun hujan mulai dari bagian hulu sungai hingga di daerah yang termasuk wilayah Kota Pekanbaru selalu menimbulkan banjir, sebagaimana yang sering terjadi hampir setiap tahun.

Tujuan penataan daerah pinggiran kawasan sungai Siak adalah ; menjadikan daerah tersebut (khususnya yang berada di wilayah Kota Pekanbaru) sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sebagai kawasan wisata dan kawasan pusat budaya Melayu.serta daerah pemukiman. Adapun daerah yang akan dijadikan sebagai kawasan tersebut meliputi : Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kaanpung Bandar dan Kelurahan Kampung Baru.

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya efek negatif, yakni timbulnya konflik baik antara masyarakat tempatan dan pendatang, maupun antara masyarakat dengan pemerintah, sebagaimana yang disampaikan oleh Camat Senapelan sebagai berikut :

"Pertama, bahwa sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat secara jelas dan transparan; Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah perlu mengajak semua pihak, terutama masyarakat yang terkena proyek pembangunan untuk berperan serta secara aktif, sehingga kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar".

Pada konteks ini peran perguruan tinggi dalam mengembangkan tingkat intelktual dan pemahaman masyarakat didaerah, melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian sangat dibutuhkan. Dewasa ini sudah ada kecenderungan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah telah menempatkan posisi perguruan

tinggi agak ketengah dalam proses pembangunan. Namun posisi serupa itu, agaknya masih belum begitu sinkron antara pihak pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam substansi perspektif. Dimana pihak Pemerintah selalu berpikir "Praktis", sementara Perguruan tinggi biasanya berpikir secara teoritis dan "apa adanya".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini merasa terdorong untuk ikut berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan penelitian dan kajian terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, untuk kemudian lebih memberdayakan masyarakat yang berada yang terkena proyek, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan, melalui konsep pembangunan partisipatif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mengupayakan agar masyarakat tempatan ikut menikmati hasil dari kegiatan pembangunan / penataan kawasan sungai Siak, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

1.2. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian tentang dampak penataan kawasan pinggiran sungai Siak Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan/tindak lanjut dari rencana penataan kawasan pinggiran sungai Siak sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, daerah tujuan Wisata dan pusat budaya Melayu.
- 2) Melihat sejauh mana dampak dari penataan kawasan pinggiran sungai Siak terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Siak.

- 3) Mengkaji Pola Pembangunan Partisipatif yang cocok bagi masyarakat, sehingga masyarakat tempatan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di daerahnya.
- 4) Memasukan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi, dengan maksud agar dapat diketahui oleh pihak - pihak yang berkepentingan dan yang peduli terhadap pembangunan daerah / kawasan pinggiran sungai.

1.3. Pentingnya atau Keutamaan Penelitian ini

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yang juga merupakan Ibukota Provinsi Riau, dengan luas wilayah 632,26 km², mempunyai penduduk pada tahun 2007 sebanyak 779.899 jiwa, meningkat menjadi 799.213 jiwa pada tahun 2008, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4,31 persen. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan membawa dampak pada penyediaan tempat pemukiman baru yang semakin luas dan kompleks, yang akan berakibat terganggunya ekosistem dan penataan ruang wilayah kota yang sudah semakin mengawatirkan.

Hal ini ditandai oleh adanya pemanfaatan ruang wilayah yang semakin tidak jelas, yakni bercampur baurnya antara tempat pemukiman, tempat pertokoan (Ruko) dan pasar serta sekolah yang banyak terdapat di beberapa sudut Kota.

Sebagai akibat dari kurang tertatanya pemakaian wilayah sesuai dengan peruntukannya, berdampak pada terganggunya tata ruang wilayah, dan akibat lebih lanjut adalah sering terjadinya banjir jika musim hujan dan kemacetan lalu lintas di beberapa bagian jalan Kota Pekanbaru.

Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai macam usaha, salah satunya adalah melakukan penataan kawasan pinggiran sungai Siak, dengan membangun beberapa pusat pengendali air/banjir, antara lain di sungai Sago dan sungai Senapelan, yang disertai dengan pembangunan saluran air dari berbagai daerah pemukiman di kota Pekanbaru. Untuk mewujudkan sungai Siak bersih dan indah maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga bermaksud akan membangun *Water Front City*, tempat kegiatan usaha ekonomi masyarakat, serta tempat untuk pejalan kaki yang diperuntukan bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan sungai Siak di sore dan malam hari, terutama di dekat jembatan Lighton (jembatan Siak I).

Dalam pelaksanaannya, berbagai permasalahan sering timbul, seperti : masalah ganti rugi tanah, pengangguran, dan penempatan kembali bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran sungai (bagi masyarakat yang tergusur), sebagaimana yang dialami oleh masyarakat di pinggiran sungai Siak akibat adanya proyek pembangunan jembatan Siak III, yang sampai sekarang belum selesai.

Adapun hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan wujud dari kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, sekaligus sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan setiap kegiatan pembangunan, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti halnya usaha penataan kawasan pinggiran sungai Siak
- 2) Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, adalah merupakan masukan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan beserta peruntukannya terutama

yang berkaitan dengan rencana penataan kawasan pinggiran sungai Siak, sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Daerah kunjungan wisata, sebagai Pusat Budaya Melayu dan juga sebagai kawasan Pemukiman masyarakat Kota Pekanbaru dimasa datang, apakah sudah layak atau perlu dilakukan revisi ulang.